



Perbaiki Tata Kelola Parkir demi Kenyamanan Wisata



Safina Rahma
Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Yogyakarta

Pematokan biaya parkir yang sangat tinggi bukanlah praktik baru di Jogja. Setiap kali memasuki masa libur, akan ada satu dua unggahan warganet mengenai biaya parkir atau harga makanan yang terlampaui mahal. Hal ini tidak hanya terjadi kala masa libur, biaya parkir mahal juga terjadi pada acara-acara tertentu, seperti Sekaten. Lebih parahnya lagi, terkadang ada petugas parkir tertentu yang mematok harga lebih pada tempat ramai pengunjung seperti Alun-Alun Utara pada akhir pekan. Libur akhir tahun kali ini pun tidak lepas dari tingginya harga parkir kendaraan. Para tukang parkir seolah paham betul mengenai konsep ekonomi, semakin tingginya permintaan tempat parkir, semakin tinggi pula harganya. Namun, penerapan ini dirasa sangat mengganggu dan tentunya menguras kantong wisatawan. Tidak sedikit pemilik kendaraan yang akan berpikir dua kali untuk memarkirkan kendaraannya karena tarif tidak normal. Padahal, ongkos

parkir pinggir jalan umum sudah diatur dalam peraturan daerah.

Praktik menaikkan tarif parkir ini sudah seharusnya ditindak secara tegas oleh pemerintah mengingat kejadian ini selalu terulang. Pemerintah bisa mengantisipasi dengan mengawasi tarif parkir setiap saat, bukan hanya ketika ada masyarakat yang mengunggahnya dan viral.

Apabila ternyata ada tukang parkir yang menaikkan harganya, aparat keamanan bisa segera tahu dan memberinya sanksi yang jelas agar ada efek jera.

Selain mengawasi setiap saat, pemerintah juga bisa berkoordinasi dengan masyarakat setempat yang mengelola parkir. Melalui cara ini, pemerintah dan masyarakat dapat bersama-sama mengawasi siapa saja tukang parkir yang bertugas. Jika pengawas sama-sama mengetahuinya, maka akan mudah untuk menemukan tukang parkir liar di kawasan tersebut. Cara ini tentunya juga akan menghasilkan pemahaman dan pengetahuan yang sama akan patokan tarif parkir sehingga masyarakat tidak lagi dirugikan.

Mengetahui tukang parkir yang bertugas juga akan lebih mempermudah penyeragaman karcis parkir. Pemerintah dapat membekali mereka dengan karcis resmi yang harganya sesuai dengan Peraturan Daerah. Karcis ini dicetak dengan jumlah banyak sekaligus sehingga ketika diperlukan tukang parkir tambahan, akan lebih mudah dikordinasi kesesuaian tarifnya.

Lebih dari itu, tukang parkir yang terkoordinasi dengan baik juga bisa memudahkan penentuan titik-titik parkir. Parkir akan lebih tertata dan mudah ditemukan oleh pengunjung. Mereka tidak akan lagi lebingungan mencari lahan parkir di tengah ramainya jalan. Selain itu, penentuan titik parkir ini akan mengurai kemacetan yang disebabkan oleh parkir-parkir liar.

Tarif parkir memang terdengar sepele namun apabila tidak diawasi juga akan merugikan tempat wisata itu sendiri. Tersiar citra parkir mahal di Jogja dan lagi-lagi kinerja pemerintah akan dipertanyakan. Pemerintah dan masyarakat pengelola bisa bekerja sama dan saling mengawasi untuk terwujudnya parkir yang lebih terkoordinasi.

Pengawasan tukang parkir dan lahan parkir ini tentunya menguntungkan dan memudahkan banyak pihak, mulai dari pemerintah, tukang parkir, dan pengunjung yang selama ini merasa paling dirugikan. Mari, ciptakan lingkungan wisata ramah pengunjung mulai dari parkir yang lebih nyaman.

Instansi	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005